

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, Pemerintah Negara Indonesia secara tegas diamanatkan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dari itu dibentuklah pertahanan negara. Hal ini menjadi wawasan pemikiran dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara dan sekaligus pengelolaan sistem pertahanan negara.

Konsep Pertahanan Negara telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa pertahanan negara ialah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai antisipasi ancaman ini, negara kita menganut konsep pertahanan negara yang bersifat semesta yang memadukan semua potensi baik dari unsur militer maupun nir militer dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman yang sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Karenanya ancaman saat ini dan masa depan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu ancaman militer

baik bersenjata maupun tidak bersenjata, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, yang bersifat nasional, regional dan internasional. Adapun dampak yang ditimbulkan meliputi segala aspek kondisi sosial terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Ancaman nonmiliter pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa ancaman berdimensi sosial ekonomi karena didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sehingga tidak tercapainya kesejahteraan yang menyebabkan ancaman yang lebih besar akan mengikuti seperti krisis dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan nasional seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan (Sumandiyar, 2020).

Pada tataran global, geo politik dunia masih dihadapkan pada persaingan kekuatan negara-negara besar. Seperti persaingan ekonomi dan perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin tajam berdampak negatif terhadap perekonomian dunia. Situasi ini diprediksi cenderung memburuk dan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian di kawasan asia, termasuk juga perekonomian Indonesia. Kemudian pada tataran nasional Indonesia memiliki potensi ancaman yang berasal dari dalam negeri salah satunya ialah krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan ancaman potensial yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan menjadi ancaman aktual. Hal ini terangkum dalam analisis perkembangan lingkungan strategis Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024. Terdapat tiga dari 15 jenis ancaman dimensi ekonomi yang disebutkan dalam Jakumhaneg yang seperti membanjirnya produk luar negeri, kesenjangan ekonomi,

pengangguran dan kemiskinan, dan krisis pangan. Jenis ancaman ini digolongkan menjadi ancaman aktual. Tanpa pertahanan yang kuat, negara menjadi lemah, bahkan bisa membawa negara dalam keadaan krisis. Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar harus mampu menjaganya dari segala gangguan dan ancaman (Posma, 2019).

Dalam perspektif Ekonomi Pertahanan, pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat, dan stabilitas inflasi, tetapi juga menjaga keamanan ekonomi dan sumber daya nasional (Supandi, 2019). Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika yang perlu dicermati dalam kurun lima tahun ke depan diantaranya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer. Seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan tercipta kekuatan pertahanan. Perubahan iklim secara tidak langsung akan berpengaruh pada masalah keamanan. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia akan menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang dapat mengarah kepada kerawanan.

Dalam Agenda Prioritas Pertahanan Negara. Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, pemerintah telah merumuskan sembilan agenda prioritas yang juga sebagai pedoman agenda prioritas pembangunan pertahanan negara, dari sembilan agenda prioritas pertahanan negara, tiga diantaranya meliputi: (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Kepentingan nasional suatu negara akan dijadikan acuan dalam perumusan serta penentuan strategi besar (*grand strategy*) ataupun strategi keamanan nasional. Keamanan nasional yang stabil merupakan prakondisi bagi terselenggaranya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Dalam kerangka itu, keamanan nasional merupakan kepentingan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis serta faktor-faktor dari dalam negeri, di antaranya pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, serta interaksi antarmasyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Kemudian upaya untuk melindungi kepentingan nasional yaitu mengamankan keutuhan wilayah nasional, mengamankan sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga negara dilaksanakan dengan upaya pertahanan negara yang dikelola secara sistematis melalui sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Bakrie (2009) dalam Posma (2019) menyebutkan bahwa ada dua elemen fisik yang mendasar dalam membangun kekuatan nasional, yaitu ekonomi dan militer. Keduanya melihat kelemahan perekonomian bangsa sebagai bentuk pertahanan dalam arti luas dan keterbatasan kemampuan militer sebagai bentuk pertahanan dalam arti sempit. Pertahanan dan perekonomian suatu bangsa merupakan satu kesatuan yang utuh karena menentukan kekuatan suatu bangsa.

Konsep ideal pertahanan negara integratif dari aspek nirmiliter dapat diikhtisari melalui pendekatan kesejahteraan (*social prosperity approach*) dan itu mencakup usaha bersama segenap komponen bangsa. Kesejahteraan umum meliputi upaya pencerdasan bangsa adalah amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban bela negara dan hak bela bangsa

dan pada gilirannya akan mendukung penguatan strategi pertahanan (Adhim, 2016).

Dua pandangan diatas menegaskan ada argumen lama tentang pertahanan kekuatan di seluruh dunia, apakah itu harus ditingkatkan atau dikurangi. Beberapa pendapat berkembang dalam mencapai tujuan suatu negara, yaitu dengan mengutamakan "*Butter*" atau kesejahteraan sosial dan kekuatan ekonomi, atau lebih mementingkan senjata "*Guns*" atau kekuatan pertahanan dan keamanan. Banyak yang berpendapat bahwa akan terjadi di seluruh dunia "*Butter*" lebih dulu daripada "*Guns*". Padahal keduanya harus berjalan beriring. Pertahanan berinteraksi dengan ekonomi melalui fungsi melindungi negara dari ancaman. Meskipun anggaran pertahanan tampaknya tidak secara langsung mempengaruhi perekonomian, namun ada dampak kritis yang menciptakan keamanan. Dengan adanya keamanan, perekonomian dapat berjalan dengan optimal. Sebaliknya, perekonomian juga mempengaruhi pertahanan melalui besarnya anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah sejalan dengan pertumbuhan pendapatan nasional yang berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan. Dengan demikian ekonomi dan pertahanan memberikan hubungan timbal balik dan sekaligus saling mempengaruhi.

Hal itu telah dijelaskan juga dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia bahwa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan martabat bangsa, dengan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komponen bangsa yang akan mengembangkan dirinya sesuai dengan aspirasi dan budaya masing-masing dalam kerangka pembangunan bangsa secara keseluruhan dengan menciptakan iklim kondusif bagi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional.

Pada Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) kita ketahui bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara. Setiap

Warga Negara melaksanakan pengabdian tersebut sesuai dengan profesinya yang disiapkan secara dini untuk menghadapi ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Lembaga pendidikan menjadi wadah efektif bagi generasi muda bangsa dalam penguataan pertahanan yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman globalisasi. Era globalisasi seperti saat ini yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) pun berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional.

Diharapkan akan terbangun generasi yang memiliki karakter disiplin, optimisme, kerja sama, dan kepemimpinan yang sudah barang tentu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Penanaman nilai cinta tanah air, artinya kita membangun rasa nasionalisme dan kebangsaan di generasi muda. Ini menjadi upaya konkret untuk menentukan sikap dalam konteks mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI (Suwandoko *et al*, 2020).

Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah faktor terpenting dalam pembentukan sebuah peradaban. Itu menjadikan lembaga pendidikan sebagai pondasi dasar bagi generasi bangsa dalam membentuk dan meningkatkan nilai-nilai karakter bangsa. Sehingga dapat mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas dengan tertanam rasa nasionalisme dan patriotisme yang kuat pada diri generasi muda bangsa. Upaya ini sangat penting karena berguna sebagai penangkal atau benteng diri dari pengaruh globalisasi yang sangat masif dan daya saing yang semakin tinggi. Secara berkesinambungan dapat

mempertahankan jati diri bangsa dan juga masyarakat memiliki filter dalam menyaring budaya, ideologi, maupun kebiasaan baru yang masuk dan dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara atau segala hal yang dapat menjadi ancaman bagi bangsa.

Selain dari pada itu dengan pendidikan juga berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, jika kesejahteraan meingkat akan terwujudnya kemajuan bangsa, kemudian akan berdampak pada peningkatan keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki potensi besar ialah Pondok Pesantren. Peran santri dalam ikut serta menjaga keutuhan NKRI sudah tidak diragukan lagi. Sejarah membuktikan, bahwa banyak peran taktis dan strategis pondok pesantren dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Para santri, Kiai, serta tokoh agama turut serta berjuang bahkan ikut serta dalam peperangan mempertahankan NKRI. Ketika imperialisme dan kolonialisme menjajah negeri ini, umat Islam sebagai mayoritas tidak tinggal diam. Bahkan, para ulama dan santri menjadi garda terdepan dalam memimpin pergerakan nasional, dalam rangka mengusir segala bentuk penjajahan yang ada di negeri ini. Seperti perang Diponegoro dan Perang Banten. Pada masa pra kemerdekaan, tokoh-tokoh seperti H. O. S. Tjokroaminoto, KH. Mas Mansyur, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Kahar Muzakir memiliki pengaruh yang besar dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, pondok pesantren juga telah berkontribusi mencerdaskan bangsa sebelum jaman kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren mempunyai saham besar dalam perjuangan bangsa dan telah menjadi salah satu benteng pertahanan negara.

Kiprah santri dalam membela negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada tahun 1943-1945 hampir semua pondok pesantren membentuk laskar-laskar, dan yang paling populer adalah laskar Hisbullah dan Sabilillah. Pada kurun waktu tersebut kegiatan pondok pesantren adalah berlatih perang dan olah fisik. Bahkan peristiwa-peristiwa pelawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial, pada umumnya dipelopori oleh para kiai sebagai pemuka agama, para haji, dan guru-guru ngaji. Pada 21 oktober 1945, berkumpul para kiai se-jawa dan madura di kantor ANO (Ansor Nahdlatul Oelama) (Royani, 2018).

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, pendidikan pesantren nyata mampu melahirkan generasi-generasi yang mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa dengan keikutsertaannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara. Penanaman rasa nasionalisme di pesantren sangatlah efektif karena sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang berdasar pada al-Qur'an dan Hadits (Ulfa, 2016).

Dari penjelasan di atas dapat kita kaitkan pada dasarnya santri, Kiai, dan aktor lain dalam pondok pesantren merupakan komponen pendukung pertahanan negara yang tergabung dalam segmen Sumber Daya Nasional yakni Sumber Daya Manusia atau Warga Negara yang dapat dimasukkan dalam kelompok garda bangsa, tenaga ahli dan warga lainnya yang dapat mengabdikan sesuai profesi, yang dapat ditugaskan untuk mendukung kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang paling tua yang sudah ada di Indonesia bahkan sebelum negeri ini berdiri. Produk asli Indonesia yang diadopsi dari agama Hindu dengan ciri khas dengan kearifan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Ungkapan ini diperkuat oleh berbagai pendapat yang mengatakan tentang sejarah perkembangan pesantren mengenai asal usul latar belakang berdirinya menyebutkan

pada awalnya pesantren merupakan pengambilalihan dari sistem pesantren orang-orang Hindu di Nusantara pada zaman dahulu.

Zamkhsyari Dhofier (1982) dalam Ulfa (2016. p. 59) mengutip beberapa pendapat para ahli seperti pendapat Prof. Jhons yang mengatakan bahwa istilah santri sebenarnya berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Sedangkan C.C Breg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tau buku-buku suci agama Hindu, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Ensiklopedi Islam memberi gambaran bahwa pesantren itu berasal dari bahasa tamil yang artinya guru ngaji atau dari bahasa India "*shastri*" dan kata "*shastra*" yang berarti buku-buku kitab suci, kitab-kitab agama atau ilmu tentang pengetahuan. Kemudian, Majid (1997) dalam Nurhadi (2017 p. 128) menyebutkan bahwa Lembaga semacam pesantren ini sudah ada sejak kekuasaan Hindu-Budha. Kehadiran Islam hanya memberi warna keislaman pada lembaga yang sebenarnya sudah ada ini.

Dalam perspektif historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia, di mana pondok pesantren tetap mempertahankan tentang nilai-nilai keaslian Indonesia yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan memiliki peranan yang sentral dan mendalam di masyarakat Indonesia.

Dengan kedudukan dan fungsinya yang khas, pondok pesantren menjadi alternatif wahana pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan sekaligus sebagai pusat pengembangan yang berorientasi pada nilai, terutama nilai-nilai keagamaan. Untuk menjalankan peran besar tersebut, santri perlu terus dikembangkan dan diberdayakan agar ia semakin besar memegang peranan sosialnya dan pentingnya meneguhkan komitmen membangun nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, persatuan, perdamaian, humanitas, serta pentingnya penanaman nilai-nilai keragaman dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi seluruh komponen bangsa (KEMHAN RI, 2017).

Dewasa ini perkembangan pendidikan pada pesantren sudah lebih modern tanpa menghilangkan kultur uniknya, banyak pondok pesantren yang sudah menjalankan pendidikan formal berupa madrasah, pendidikan keterampilan, juga perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren terus mengadaptasikan perubahan dan tantangan sosial masyarakat, baik konteks lokal, nasional, maupun global. Tidak hanya memiliki potensi dalam konteks spiritual agama saja melainkan juga dalam segala bidang baik itu pendidikan, sosial serta ekonomi. Ini sejalan dengan upaya pertahanan negara dalam konteks nirmiliter.

Jika dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini, Pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, Ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Ribuan pondok pesantren yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara profesional (Muhajir, 2014)

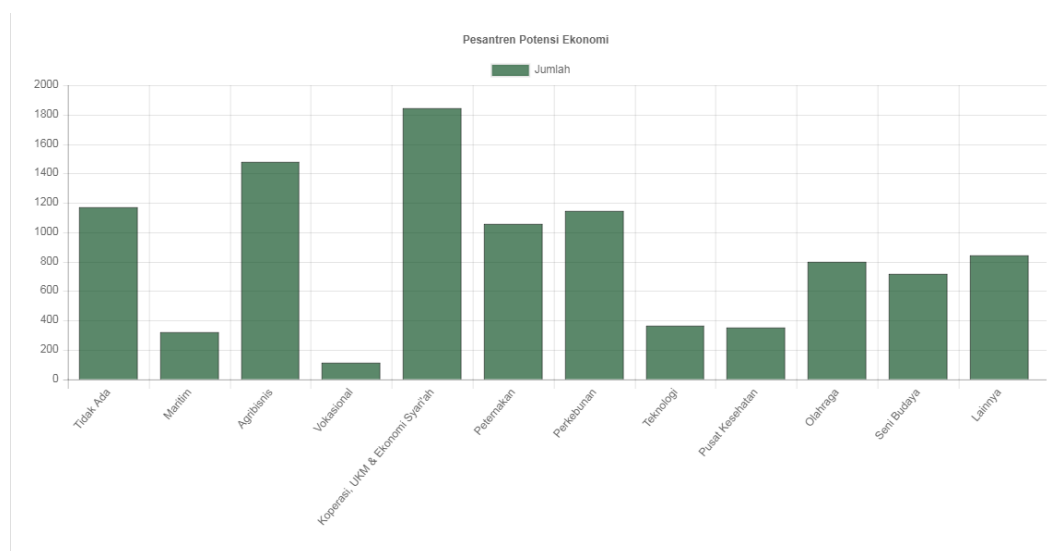
Seiring dengan pentingnya upaya sebuah penelitian untuk menganalisis praktek ekonomi (individu atau masyarakat) yang mempunyai kegiatan usaha, maka dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menelusuri aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia, yaitu kelompok masyarakat (*social group*). Kelompok masyarakat (*social group*) yang dipilih adalah masyarakat pondok pesantren yang sesuai dengan program pemerintah atau tidak bertentangan dengan undang-undang dan dasar negara.

Pada tahun 2020 Kementrian Agama mencatat ada 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga saat ini

sebanyak 33.218 pondok pesantren tercatat di kementerian agama. Perkembangan pesantren secara kualitatif menurut Lombard (2005) dalam artikel Kementerian Agama RI (2021) dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satu diantaranya ialah diversifikasi usaha ekonomi.

Pondok pesantren dengan nilai-nilai spiritualitas dengan kegiatan ekonomi masyarakat sejak dahulu sudah erat kaitannya dan memiliki hubungan yang signifikan. Ini dibuktikan dengan Penelitian Horikoshi (1987) di Garut, Jawa Barat pada awal tahun 1970-an, yang memberikan kesimpulan bahwa kebanyakan pengusaha di Garut adalah santri atau dari keluarga kyai yang sangat taat beragama dan mereka pun aktif dalam organisasi modern (Rizal, 2011).

Harus diakui, lembaga pendidikan pesantren tidak luput dari kekurangan terutama dalam masalah manajemen ekonomi. Masih banyak pesantren belum memaksimalkan potensinya hingga tidak sedikit pondok pesantren (terutama kelas menengah ke bawah) yang berjalan di tempat, tidak dapat tumbuh dan berkembang bahkan kandas dalam perjuangan keberlanjutan aktivitasnya karena masalah roda perekonomian di dalamnya yang tidak berjalan dengan baik.



Gambar 1. 1 Potensi Ekonomi Pesantren di Indonesia

Sumber: Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama (2021)

Dari grafik Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama tersebut terlihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kegiatan Koperasi, UMKM, & Ekonomi Syariah merupakan potensi terbesar dari yaitu berjumlah 1.845 pesantren dan masih terdapat 1.166 pondok pesantren yang belum memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Kemudian masih banyak pengelolaan UMKM pondok pesantren yang belum maksimal. Pesantren masih terfokus pada pendidikan menyebabkan unit usaha hanya sekedar ada. Dikarenakan terfokus pada pengelolaan pendidikan ini serta belum adanya pemisahan pada manajemen bisnis dan pendidikan mengakibatkan pengelolaan yang bercampur aduk, tidak terkelola dengan baik, dan belum terintegrasinya bisnis pondok pesantren.

Masalah selanjutnya ialah sumber pendanaan yang terfokus pada iuran bulanan santri, swadaya pendidik, donatur, dan bantuan pemerintah yang mana sumber dana ini merupakan sumber dana yang bersifat insidentil. Sumber pendanaan pondok pesantren yang bersifat tidak tetap tidak bisa menjaga keberlangsungan pondok pesantren. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan pondok pesantren yang semakin pesat. Sangat disayangkan jika hanya mengandalkan sumber-sumber pedanaan tidak tetap.

Padahal potensi ekonomi pada pondok pesantren sangat besar. Adanya potensi-potensi di pondok pesantren merupakan modal berharga untuk mengembangkan ekonomi. Melalui pengelolaan unit-unit usaha mampu meningkatkan eksistensi pondok dalam mencetak kader-kader intelektual sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Karena lembaga ini melakukan pemberdayaan ditingkat paling bawah (*grassroots*) dan banyak diminati masyarakat luas.

Hartarto (2021), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan potensi ekonomi pada pondok pesantren di Indonesia sangat besar. Saat ini jumlah pesantren di Indonesia pada Triwulan I

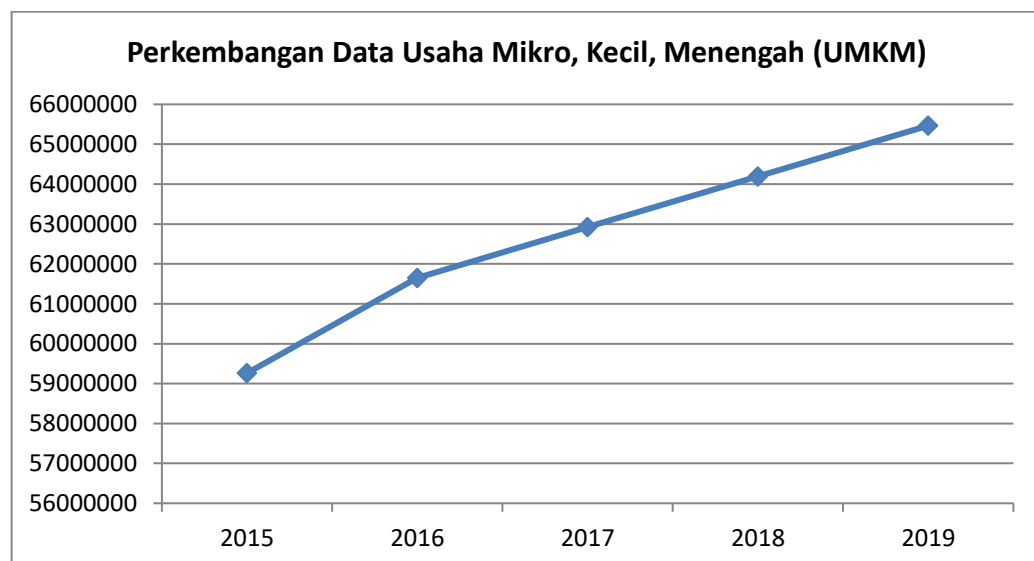
2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang. Dari jumlah tersebut, ia menyebut 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 50% dari total jumlah pondok pesantren di Indonesia belum memberdayakan potensi yang dimilikinya.

Pondok pesantren beserta santrinya merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan aset bagi kemajuan bangsa. Kita tidak dapat menampik bahwa perkembangan pesantren memiliki banyak kelemahan, utamanya disebabkan karena tidak diimbangi kemampuan dan profesionalisme yang memadai. Meski tidak dapat dipungkiri, pola manajemen yang berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan dapat menjadi modal dasar utama dalam kehidupan dan eksistensi pesantren. Namun demikian, konsep pengembangan manajemen pesantren harus lebih akomodatif terhadap perubahan yang serba cepat dalam era global saat ini.

Untuk mempertahankan keberlangsungan dan menjalankan peran besar tersebut, perlu didukung dengan sarana prasarana, pembinaan, dan program yang menunjang keberlangsungan. Maka, sebuah lembaga pendidikan dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik dan perlu adanya sumber pendanaan yang mandiri dan bersifat tetap untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan. Dengan memberdayakan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pondok pesantren yang akan digunakan untuk pengembangan pengajaran. Implikasi dari pengembangan pengajaran ini adalah dalam mencetak santri dengan inteligensi yang baik. Sejalan dengan itu, dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang secara berkesinambungan berkontribusi terhadap kemandirian masyarakat, menciptakan kesejahteraan yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional. Tentunya ini akan berguna baik dalam rangka mendukung ekonomi pertahanan yang pada akhirnya memperkuat pertahanan negara.

Di masa lalu, UMKM telah memberikan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Meski dunia tengah babak belur akibat krisis 1998, namun UMKM dapat bertahan dan berperan besar menjadi penyelamat ekonomi di saat banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai luluh lantak. Terutama di tengah pandemi ini, UMKM sebagai penopang perekonomian dituntut untuk melakukan inovasi dan mengikuti tren pasar. Selain itu juga harus bersama-sama juga bangkit, bersinergi, serta bahu-membahu menjadikan UMKM senjata untuk melawan pandemi yang menyerang sisi perekonomian.

UMKM memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,1%, penyerapan tenaga kerja sebesar 97,1%, dan ekspor 14,4%. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya kontribusi terbaik untuk terus meningkatkan UMKM dalam perekonomian yang secara berkesinambungan akan mendukung kekuatan ekonomi pertahanan.



Gambar 1. 2 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, diolah oleh peneliti (2021)

UMKM merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi dan berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dari data yang diperoleh diatas usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada 2015, tercatat 59,3 juta UMKM di Indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Diprediksikan bahwa pada tahun, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat.

Melalui UMKM sebagai salah satu bentuk upaya mengelola sumber daya strategis pada masa damai guna menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional. Potensi ekonomi yang ada pada pondok pesantren ini akan turut serta pada upaya pertahanan dari sisi ekonomi, sebab dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pertahanan yang kuat diperlukan kemampuan pembiayaan untuk pengeluaran anggaran pertahanan yang memadai (Supandi, 2020. p. 11).

Kekuatan ekonomi menjadi faktor strategis untuk kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Fenomena ini yang kemudian harus disikapi dan dipahami secara akademis sebagai faktor *environment* dalam analisis atau kajian pengembangan studi ekonomi pertahanan, untuk kepentingan kemampuan pertahanan (Supandi, 2020)

Hasil penelitian berikut ini menjadi bukti bahwa tidak sedikit pengelolaan unit usaha pondok pesantren belum maksimal seperti pada penelitian Wibowo (2020) yang dilakukan pada rasio terhadap kinerja Kopontren Khidmat Suryalaya Tanjungkerta Pagersari selama 5 tahun. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan tingkat rasio likuiditas yang dinilai melalui cash ratio dalam keadaan penilaian kurang baik atau "Dalam Pengawasan Khusus". Oleh karena itu koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Begitu pula pada tingkat rasio

solvabilitas dengan keadaan “Dalam Pengawasan Khusus” ini menunjukkan bahwa kinerja Koperasi Hidmat Pondok Pesantren kurang mampu menggunakan modal sendiri untuk membiayai seluruh kegiatan usahanya atau menutupi penurunan nilai aktiva. Kemudian hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fauzi, Muhammad (2017) pada Koperasi Pondok Pesantren Al Hidayat Pringapus. Berdasarkan penelitian ini, menyatakan kinerja keuangan yang dimiliki oleh koperasi tersebut berdasarkan analisis rasio likuiditas dalam keadaan kurang baik.

Diantara pesantren yang telah mengembangkan peran pemberdayaan adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung. Pondok pesantren yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung karena dalam penelitian ini perlu adanya prototipe untuk dijadikan *role model*. Pondok Pesantren ini sudah berjalan sejak tahun 1970 dan masih masih eksis hingga saat ini dan memiliki banyak prestasi pada bidang pengembangan UMKM dengan mengelola potensi pertanian yang ada dilingkungan Kecamatan Ciwidey dan Rancabali.

Erick Thohir (2021) Menteri BUMN menyebutkan bahwa Kopontren Al-Ittifaq menjadi contoh nyata di mana pesantren selain menjadi sarana pendidikan agama Islam, juga dapat menyejahterakan rakyat. Diantara prestasinya ialah, telah diresmikan pilot project model bisnis pengembangan ekosistem rantai halal berbasis pesantren oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (2021), berhasil meraih penghargaan dari Bank Indonesia sebagai pondok pesantren teresponsif untuk penerapan ekonomi digital (2020), tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden (1998) Parama Bhoga Nugraha Hari Pangan Sedunia XIX (1999), Kalpataru Lingkungan Hidup (2003), Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2003), Juara 1 Organisasi Berprestasi tingkat Provinsi (2005), Pelaku Usaha Budidaya Pertanian (2006), Bank Danamon Award kategori Nirlaba (2007), Polisi Masyarakat (2009).

1.2 Fokus dan Subfokus

Fokus dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan UMKM dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengembangan pengajaran.

Adapun yang menjadi subfokus Untuk pada penelitian ini adalah :

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung.
- b. Dampak pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung.
- c. Upaya pembinaan pelatihan ekonomi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat di tarik Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemberdayaan UMKM Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung dalam mendorong kemandirian pesantren?
- b. Bagaimana dampak pemberdayaan UMKM Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan pengajaran?
- c. Bagaimana upaya pembinaan pengembangan UMKM di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pendapatan dan pengembangan pengajaran guna mendorong kemandirian pesantren dalam mendukung ekonomi pertahanan.

- b. Menganalisis dampak pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung terhadap peningkatan pendapatan dan pengembangan pengajaran.
- c. Menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kabupaten Bandung dalam rangka pembinaan dan pelatihan pengembangan UMKM.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk mendukung serta meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan serta memperkaya referensi perpustakaan bidang pertahanan. Khususnya kajian mengenai Pemberdayaan UMKM, menambah literatur mengenai hal tersebut bagi lingkungan Prodi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan menambah wawasan, khususnya mengenai pemberdayaan UMKM pesantren modern dalam rangka prototipe meningkatkan pendapatan dan pengembangan pengajaran.
- b. Bagi lembaga pendidikan lainnya terkhusus pondok pesantren, agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai pemberdayaan UMKM Pesantren dalam rangka kemandirian meningkatkan pendapatan dan pengembangan pengajaran.